

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian partisipasi masyarakat dalam perspektif individu terhadap Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sarangan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Merujuk pada teori yang dikemukakan Brandon (1998) tentang jenis partisipasi nyata/ada wujud fisik, bentuk partisipasi di Kelurahan Sarangan memang lebih banyak didominasi oleh partisipasi berupa fisik. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya adalah sumbangan uang, tenaga, harta benda, dan keterampilan, masyarakat dominan memberikan sumbangan uang berupa iuran pokok lingkungan dan iuran wajib paguyuban bila terdaftar sebagai anggota aktif, kemudian diikuti dengan sumbangan harta benda yang diberikan dalam wujud alat-alat perkakas atau bahan bangunan (material pasir, batu, kerikil) untuk kegiatan kerja bakti ketika bersih desa atau kegiatan swadaya pembangunan/perbaikan infrastruktur, serta sebagian berupa konsumsi untuk menunjang kegiatan tersebut. Sedangkan sumbangan tenaga diberikan untuk kegiatan-kegiatan mandiri yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat. Sumbangan keterampilan juga diberikan oleh beberapa anggota masyarakat yang memiliki keahlian khusus berupa pelatihan-pelatihan mandiri maupun pelatihan yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan satu fakta menarik bahwa bentuk partisipasi yang dilakukan selama ini ternyata didasarkan pada semangat gotong-royong secara mandiri dari masyarakat, bukan karena ajakan maupun dorongan dari pemerintah setempat, meskipun dalam praktiknya pemerintah telah berusaha dan beberapa kali memberikan kesempatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan desa wisata.
2. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan dapat dilihat dari hasil penilaian di setiap tahapan pembangunan, sesuai dengan teori dari Ericson (dalam Slamet, 1993) serta klasifikasi partisipasi Arnstein (1969). Mulai dari tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat sebagian besar masih berada pada tingkatan *non-participation*, meskipun ada pula sebagian kecil yang masuk ke dalam kategori *tokenism* dan *citizen control*. Untuk tingkat partisipasi pada tahapan pelaksanaan program/kegiatan, masyarakat sebagian besar masih berada pada kategori *non-participation*, kemudian tersebar merata pada kategori *tokenism* dan *citizen*

*control*. Pada tahapan pemanfaatan hasil dan evaluasi tingkatan partisipasinya sebagian besar berada dalam kategori *non-participation*, kemudian tersebar merata dalam kategori *tokenism*. Tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam kategori *citizen control*. Sehingga secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sarangan berada pada tingkat kedua dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkatan *therapy* yang masuk dalam kategori *non-participation*.

3. Faktor-faktor internal menurut Slamet (1993) terdiri dari usia, jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan analisis tabulasi silang, hanya faktor tingkat pendapatan dalam tahapan pelaksanaan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. Nilai rata-rata korelasi yang muncul mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel bebas tingkat partisipasi dan variabel terikat faktor internal berada pada kategori sangat rendah, sehingga berbanding lurus kepada hasil analisis yang menunjukkan faktor usia, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan yang tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan variabel jenis kelamin tidak termasuk sebagai variabel terpilih untuk dilakukan analisis tabulasi silang dikarenakan persebaran jenis kelamin tidak menjadi satu parameter utama dalam penentuan responden.
4. Merujuk kepada teori dari Sunarti (2003) faktor eksternal dapat dikatakan sebagai semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap suatu wilayah, yang dalam kasus ini terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa. Berdasarkan analisis tabulasi silang, faktor tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa yang disebutkan diatas ternyata sangat mempengaruhi partisipasi aktif dari masyarakat. Faktor tokoh masyarakat berperan dalam memberikan ajakan dan masukan-masukan membangun di seluruh tahapan pembangunan. Faktor pemerintah kabupaten berperan dalam mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat setempat terhadap berbagai program/kegiatan pengembangan desa wisata selama ini. Faktor pamong desa berperan dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap budaya guyub dan gotong-royong, memfasilitasi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik atau saran terkait berbagai permasalahan sosial/infrastruktur sehingga nantinya dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta di lapangan, faktor tokoh masyarakat berada pada kategori rendah dengan persentase sebesar 87% atau sebanyak 80 orang. Faktor pemerintah kabupaten berada pada kategori rendah dengan persentase jawaban yang mendukung pernyataan tersebut sebesar 86% atau sebanyak 79 orang. Faktor pamong desa berada pada kategori tinggi yang merujuk kepada persentase absolut 83% atau total sebanyak 76 responden yang memberikan pernyataan tersebut.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kepada temuan penelitian serta kesimpulan yang telah dirumuskan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemangku kebijakan (pemerintah kelurahan maupun pemerintah kabupaten) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dirasa perlu untuk meningkatkan intensitas keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terkait dengan agenda pengembangan desa wisata secara berkelanjutan di Kelurahan Sarangan. Selain itu, sifat transparansi dalam segala aspek hendaknya lebih ditingkatkan mengingat banyaknya masukan-masukan dari masyarakat selama penelitian berlangsung yang menyoroti hal tersebut. Upaya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa saling memiliki terhadap obyek-obyek wisata yang ada tentu juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah setempat demi mencapai hasil pembangunan yang ideal dan maksimal dari terbentuknya masyarakat yang mandiri sekaligus kooperatif dengan otoritas yang lebih tinggi.
2. Merujuk kepada penjelasan dari beberapa masyarakat, bantuan finansial dirasa masih perlu untuk menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat terkait desa wisata karena selama ini penduduk setempat masih mengandalkan sumber pendanaan secara swadaya yang jumlahnya terbatas. Hal tersebut penting untuk dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten terhadap pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat, dengan harapan nantinya masyarakat tidak lagi bersikap skeptis dan merasa bahwa pengelolaan pariwisata yang ada di desa mereka merupakan tanggungjawab pemerintah semata.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui penyuluhan/pelatihan bagi anggota-anggota aktif paguyuban wisata ataupun masyarakat secara umum juga perlu untuk ditingkatkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan maksimal dan masyarakat setempat merasa benar-benar terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Sejauh ini respon masyarakat sangat positif dan apresiatif terhadap upaya pemerintah kabupaten maupun provinsi dalam memberikan pelatihan, hanya kualitas materi yang disampaikan dari waktu ke waktu dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman.
4. Secara khusus perlu dilakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada masyarakat setempat terkait dengan informasi mengenai adanya program pengembangan desa wisata yang sedang dijalankan dibawah pengawasan pemerintah kabupaten agar keterlibatan masyarakat berjalan secara penuh dan mandiri. Hal ini dikarenakan hampir seluruh responden penelitian mengatakan bahwa mereka sekedar mengetahui adanya program ini dari mulut ke mulut tanpa mencoba untuk mengorek informasi lebih dalam, bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang eksistensi program tersebut.